

TESIS

FORMULASI KETENTUAN PIDANA ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

ARDI WINARNO
NPM : 15310004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017

TESIS
FORMULASI KETENTUAN PIDANA ATAS PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERSERTIFIKAT
HALAL

Diajukan oleh

ARDI WINARNO, SH.
NPM : 15310004

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal, 26 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

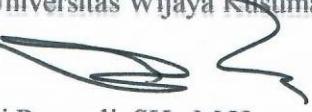


Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH.



Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum.

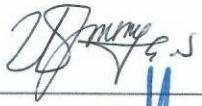
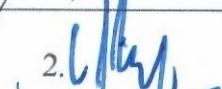
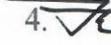
TESIS
FORMULASI KETENTUAN PIDANA ATAS PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERSERTIFIKAT
HALAL

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARDI WINARNO, SH
NPM : 15310004

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 jam 11.00 Wib.

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji		Tanda tangan
Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum.	Ketua	1. 
Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum.	Anggota	2. 
Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH.	Anggota	3. 
Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum.	Anggota	4. 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 09 Agustus 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirahim

Segala puji pertama – tama kutujukan kepada Allah SWT dengan ridloh, hidayah serta inayah Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Karena hanya dengan petunjuk Nya saya dapat membagi sedikit ilmu dunia yang saya tahu, mengenai “ **FORMULASI KETENTUAN PIDANA ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERSERTIFIKAT HALAL** ”.

Kemudian tak lupa sembah sujud kepada Ibunda Soewarni (Almarh) dan ayahanda H. Ponadi yang telah membesar dan mendidik dengan penuh disiplin dan kasih sayang serta Kakakku, adikku, istri dan anak – anakku yang telah memberi bantuan moral dan do'a yang sangat berguna bagi penulis selama pembuatan Tesis ini.

Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulisan dan penyelesaian Tesis ini :

1. Prof. Sri Harmadji dr. Sp. THT- KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bambang Yunarko, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

4. Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
6. Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum., Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum., Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH., dan Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum. selaku dosen penguji Tesis ini yang telah meluangkan waktu dan perhatian pada saat sidang Tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
8. Teman – teman Kantor Hukum **RF LAW OFFICE “ RUDY, FERDI & REKAN ”** yang telah memberikan masukkan dan dorongan semangat hingga terselesainya penyusunan Tesis ini.

Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan pada penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Agustus 2017

P e n u l i s

Ardi Winarno, SH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ARDI WINARNO**

N P M : **15130004**

Alamat : Jalan Asemjaya 5 / 37 Surabaya

Nomor Telp (HP) : 082131004068 / 085853087478

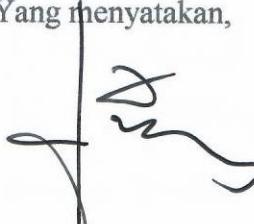
Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul "**FORMULASI KETENTUAN PIDANA ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERSERTIFIKAT HALAL**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Agustus 2017

Yang menyatakan,



ARDI WINARNO, SH.
N P M : 15310004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i.
KATA PENGANTAR	iii.
PERNYATAAN ORISIONALITAS	v.
DAFTAR ISI.....	vi.
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT.....</i>	ix.
BAB I PENDAHULUAN	
A. Permasalahan dan Rumusan Masalah	1.
B. Tujuan Penelitian	31.
C. Manfaat Penelitian	31.
D. Metode Penelitian	32.
1. Pendekatan Masalah	32.
2. Bahan Hukum	33.
3. Analisan Bahan Hukum	33.
E. Kajian Teoritis	33.
F. Sistematika Pertanggungjawaban	35.

BAB II FORMULASI KETENTUAN PIDANA ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN BERSERTIFIKAT HALAL YANG MELANGGAR

A. Kewajiban Bagi Produsen Untuk Mensertifikatkan Produk Yang Diperdagangkan Di Indonesia	37.
B. Jaminan Produk Halal Sebagai Kewajiban Asasi Negara	39.
C. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Halal	50.
a. Prosedur Mengurus Sertifikat Halal	52.

b.	Sistem Pengawasan Sertifikat Halal	56.
c.	Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal	57.

BAB III SANKSI ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL.

A.	Penerapan Terhadap Sanksi Pidana dan Unsur – Unsurnya	64.
B.	Keterkaitan Dan Pentingnya Sertifikat Halal dan Labelisasi Halal	66.
C.	Penentuan Titik Kritis Suatu Produk Halal	75.
1.	Kelembagaan	81.
2.	Standart	84.
3.	Pengakuan Bersama Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha	86.
4.	Pengaruh Persaingan Global	87.

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	90.
B.	Saran	91.

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua produk makanan dan minuman agar terjaga kehalalannya. Dikarenakan jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, maka Negara harus memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan terbitnya Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana formulasi ketentuan pidana atas produk makanan dan minuman olahan bersertifikat halal yang melanggar dan Apa sanksi produk makanan dan minuman olahan pada di Indonesia belum bersertifikat halal.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan apa akibat hukum bila para pelaku usaha tidak bisa menjaga kehalalan dari produk yang dihasilkan sehingga Pemerintah menyarankan setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mengurus dan melengkapi dokumen tentang spesifikasi halal.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara yuridis normatif dan pendekatan konseptual mengenai isu hukum dan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

Peran serta pemerintah merupakan sebuah tanggungjawab dengan mengukuhkan perihal halal – haram ini kedalam suatu aturan. Dengan adanya aturan Undang – Undang yang mengatur secara khusus mengenai kehalalan terhadap produk pangan merupakan kebutuhan dasar yang aling utama dan pemenuhannya merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin didalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sebagai komponen dasar untuk mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Simpulan dari penulisan Formulasi Ketentuan Pidana atas produk makanan dan minuman yang bersertifikat halal adalah dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah nyata Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan merupakan upaya menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi. Bahwa dengan adanya sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar dapat dijalankan supaya dapat memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum produk halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Kata kunci : Formulasi Ketentua Pidana, Produk Halal dan Sertifikasi Halal

ABSTRAC

It is a duty for the Indonesian government to provide legal protection for all food and beverage products to maintain halal. Because the majority of Indonesia's population is Muslim, therefore the State must provide legal certainty and legal guarantee to the products consumed by the public. With the issuance of RI Law Number. 33 of 2014 about on Halal Product Guarantee aims to know: How is the formulation of criminal provisions on processed food products and beverages products that are certified halal in violation and What sanctions processed food products and beverages products in Indonesia has not been certified halal.

The purpose of this writing products paper is to know and explain what the legal consequences effect if the business actors can not maintain the halal of the resulting product so that the Government suggests every business actor is obliged to take care and complete the document about halal specification.

Research methods undertaker of research conducted by the author with juridical normative and conceptual approaches concerning legal issues and not moving from the rule of law that is related to this writing.

The role of government is a responsibility by affirming this illegitimate lawful matter of halal into a rule. With the existence provisions of a rule of the Act specifically regulating the halal to food products is the most basic need and fulfillment is the Human Rights guaranteed in the law the basic state Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as a basic component to realize qualified human resources.

The conclusion of the writing is the Criminal Procedure Formulation on halal certified food and beverage products is the existence of the Halal Products warranty Act is a concrete step of the Government of the Republic of Indonesia in realizing the protection of the entire Indonesian nation and is an effort to ensure the comfort, safety and certainty of availability of Halal products for the society people in consuming. By the existence of criminal sanctions which has been arranged in Article 56 and Article 57 of Law of RI Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee to be executed in order to give provide legal assurance guarantee of halal product for Muslim Consumers in Indonesia in consuming the product.

Keywords : Formulation of Criminal Section, Halal Product and Halal Certification.